



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029

- Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
- Tujuan : Meningkatkan PDRB, produktivitas ekonomi daerah dan kualitas pemanfaatan ruang sektor kelautan dan perikanan
- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- Fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4) Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan Fungsinya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan (%)	$\frac{\text{indeks yang diterima nelayan}}{\text{indeks yang dibayar nelayan}} \times 100$	BPS Sulteng, Bidang Perikanan Tangkap, UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah I – VII	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
	2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%)	$\frac{\text{indeks yang diterima pembudidaya}}{\text{indeks yang dibayar pembudidaya}} \times 100$	BPS Sulteng, Bidang Perikanan Budidaya & P2HP, UPTD Balai Perbenihan Perikanan	
	3. Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	$\sum_{i=1}^n \frac{\text{KIDRT} \times \text{WEIND}}{\text{JP}}$ Ket: KIDRT = Konsumsi Ikan perKapita di rumah tangga (setara utuh segar) WEIND = Penimbang Individu JP = Jumlah Penduduk	Bidang Perikanan Budidaya & P2HP, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Dinas Perikanan Kab/Kota	
2. Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang Berkelanjutan	4. Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan Terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial	$\frac{\text{kawasan lindung perairan} + \text{kawasan pemanfaatan ruang laut}}{\text{total luas perairan teritorial}}$	Bidang Pengelolaan Ruang Laut, UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah I – VII	
3. Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	5. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Peraturan Per UU (%)	$x = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{c_i}{s_i} \times 100 \right)}{n}$ Ket: x = Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ci = Jumlah sampel pelaku usaha KP yang patuh si = Jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i = Jenis komponen pelaku usaha KP n = Jumlah komponen pelaku usaha KP	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan	

Palu, 8 September 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. MOH. ARIF LATUJUBA, SE. M.Si
NIP. 19660418 1992031 008